

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA ELEKTRONIK (E-PPDB) TINGKAT SMP BERBASIS PEMETAAN ZONASI DI SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 4 SAWAN

Oleh: Ni Luh Santrining<sup>1</sup> dan Gede Sandiasa<sup>2</sup>

## Abstraksi

Perkembangan teknologi di bidang pemerintahan yang disebut *e-government* semakin gencar dilaksanakan. Salah satunya dalam implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Elektronik (E-PPDB). Peneliti merumuskan masalah: 1) Bagaimanakah implementasi E-PPDB pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan? 2) Apakah faktor pendukung dan penghambat implementasi E-PPDB pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan? 3) Bagaimanakah dampak penggunaan E-PPDB pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan?

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan dan mengolah data hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi dan dijelaskan melalui diskripsi hasil pengolahan data tersebut untuk mudah dipahami, analisis data menggunakan analisis kualitatif sepanjang berlangsungnya penelitian secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi E-PPDB pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan, dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, namun masih ada beberapa kekurangan pada disposisi atau ketanggapan sikap dari pelaksana kebijakan; 2) Faktor pendukung dari implementasi E-PPDB ini adalah didukung oleh sumber daya yang baik dan memadai, manajemen kepala sekolah yang baik, pemanfaatan sistem yang *user friendly* atau mudah dimengerti pengguna, dan kerjasama yang baik antar pelaksana dan kelompok sasaran; 3) Implementasi E-PPDB memberi dampak pada sebagian besar hasil memperlihatkan dampak positif dari pelaksana dan kelompok sasaran yaitu sistem pendaftaran siswa menjadi lebih efektif dan efisien bagi kelompok sasaran, proses pembelajaran menjadi lebih mudah; kemudahan dalam mengakses kegiatan sekolah; kemudahan dalam membina siswa, dan meringankan biaya transportasi bagi peserta didik.

Rekomendasi yang dihasilkan adalah 1) Penggunaan E-PPDB dapat diterapkan secara menyeluruh di semua tingkat satuan pendidikan, 2) Agar dapat dikembangkan peningkatan validasi pada data alamat peserta didik; 3) Pelaksana agar memiliki rasa komitmen dan disiplin yang lebih baik; 4) Sistem E-PPDB agar dapat juga digunakan sampai pada proses pendaftaran kembali.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, E-PPDB, zonasi, sistem, *online*

<sup>1</sup>Staf Administrasi SMAN 1 Sawan: Email: [niluhsantrining@gmail.com](mailto:niluhsantrining@gmail.com)

<sup>2</sup>Staf Pengajar Universitas Panji Sakti: Email: [sandiasagede1970@gmail.com](mailto:sandiasagede1970@gmail.com)

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat. Penggunaan teknologi telah menjamah berbagai bidang, tak terkecuali bidang pemerintahan. Pemanfaatan teknologi di bidang pemerintahan dikenal dengan istilah *e-government*. *E-government* telah sebagian besar tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. E- Government dilaksanakan dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan yang lebih baik dan efisien sebagaimana pendapat berikut “*pelayanan berbasis E-Government* sebagai media dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal, efektif dan efisien” (Juliawati & Sandiasa, 2019: 1)

Tugas pemerintah sebagai regulator adalah menerbitkan suatu kebijakan publik. Setelah disahkan oleh pejabat berwenang, kebijakan publik tersebut harus diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan, karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori Edward III (dalam Subarsono, 2011) terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah diberlakukannya sistem zonasi pada kegiatan penerimaan peserta didik baru sekolah dasar dan menengah. Dengan sistem zonasi, semua sekolah, khususnya sekolah negeri, disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga “anak-anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya (Kemendikbud, 2018).

Tujuan pemerintah melalui sistem zonasi ini adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan seluruh Indonesia. Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berimplikasi pada pudarnya status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan adanya “kasta” dalam sistem persekolahan di Indonesia. Namun dalam implementasi sistem zonasi, masih terdapat banyak resistensi dari berbagai

pihak, khususnya orang tua peserta didik dan peserta didik bersangkutan.

Para orang tua dan masyarakat sepertinya masih ragu akan efektivitas dan efisiensi dari program sistem zonasi PPDB ini. Sebagian orang tua peserta didik dan peserta didik sendiri lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan pilihan yang berada di luar zonasi daerah tempat tinggalnya.

Berdasarkan hal tersebut, penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan di Satuan Pendidikan SMP Kabupaten Buleleng sebagai tindak lanjut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; Pemerintah Kabupaten Buleleng menerbitkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Tindak lanjut Peraturan Bupati tersebut adalah dikembangkannya sistem penerimaan peserta didik baru secara daring menggunakan sistem berbasis *web* yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru secara elektronik (E-PPDB).

E-PPDB adalah sistem yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan kegiatan rutin setiap tahun yaitu penerimaan peserta didik baru. Tujuan utama pembuatan sistem daring ini adalah agar dapat mengakomodir sistem zonasi tersebut, sehingga meminimalisir pendaftaran peserta didik pada sekolah yang berada di luar zonasi yang telah ditentukan.

Sistem E-PPDB baru dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Di awal implementasi, E-PPDB dianggap cukup mampu mengakomodir aturan zonasi tersebut. Hal tersebut dilihat dari data penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 4 Sawan pada tahun 2021. Dari 130 peserta didik yang diterima di SMP Negeri 4 Sawan, 93,1% alamat peserta didik berasal dari Desa Sangsit yang merupakan daerah zonasi dari SMP Negeri 4 Sawan, dan 6,9% berasal dari luar zonasi SMP Negeri 4 Sawan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kebijakan tentang penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Kabupaten Buleleng melalui sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Elektronik (E-PPDB) Tingkat SMP Berbasis Pemetaan Zonasi di Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan”.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Pengertian E-Government**

Menurut *The World Bank Group* (Suaedi, 2010:54), *e-government* ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Pengembangan *e-government* berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

### **2.2. Kebijakan Publik**

Menurut Thomas R. Dye (Anggara, 2014), "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Sementara menurut Harold D Laswell dan Abraham Kaplan (Taufiqurakhman, 2014), memberi arti kebijakan sebagai "*a project program of goals, values and practise*" (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah). Amara Raksasatya (Sandiasa, 2016: 5), mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu: (1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, (2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan nyata dari taktik atau strategi.

### **2.3. Implementasi Kebijakan Publik**

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2011), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial. Karena seberapa baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Teori Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

#### **2.4. Dampak Kebijakan Publik**

Dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan (Islamy, 2010). Menurut Anderson (Islamy, 2010), dimensi dampak kebijakan publik adalah dampak kebijakan yang diharapkan (*intented consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*), limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari kebijakan tersebut, dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang, dan dampak kebijakan terhadap biaya langsung atau *direct costs*.

#### **2.5. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Elektronik (E-PPDB)**

E-PPDB adalah sebuah sistem berbasis web yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagai tindak lanjut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, khususnya pasal 29 yang menjelaskan “*Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring*”. Mekanisme daring tersebut dijabarkan kembali di Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

#### **2.6. Pemetaan Zonasi pada Lingkungan Satuan Pendidikan**

Sistem zonasi mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tujuan pemerintah melalui sistem zonasi ini adalah bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan seluruh Indonesia. Sistem zonasi sangat mempermudah peserta didik untuk mendapatkan sekolah dalam rangka pendidikan. Karena sistem zonasi menyamaratakan semua sekolah

dasar dan menengah. Sistem zonasi dapat menghapuskan sebutan sekolah favorit yang disematkan pada sekolah-sekolah tertentu, karena semua sekolah itu sama. Jadi setiap peserta didik tidak harus mencari sekolah yang jaraknya jauh dari rumah.

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2014: 9). Dalam penelitian yang dilaksanakan, informan yang dipandang mampu memberikan informasi yang akurat yaitu pengguna sistem E-PPDB pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan dan SD sekitar yang menjadi daerah zonasi SMP Negeri 4 Sawan berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Informan pada setiap satuan pendidikan tersebut dipilih secara *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang didapatkan dari informan yang telah ditentukan, yaitu kepala sekolah, operator sekolah dan panitia penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 4 Sawan dan SD di Desa Sangsit yang menjadi zonasinya. tempat dan peristiwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yaitu SMP Negeri 4 Sawan dan kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan sistem E-PPDB di sekolah tersebut, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu dokumen yang terkait dengan pendaftaran, verifikasi data dan proses penerimaan peserta didik baru menggunakan E-PPDB.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui catatan-catatan, dokumen-dokumen dan laporan terkait dengan penelitian yang dilaksanakan dan relevan dengan masalah dan fokus penelitian.

Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan *research question* atau fokus penelitian (Hendarso, 2011). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi E-PPDB pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi E-PPDB pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal; dan dampak penggunaan E-PPDB pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan, yang meliputi dampak positif dan dampak negatif atau dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi yaitu peneliti mengamati proses pendaftaran, verifikasi data dan proses penerimaan peserta didik baru menggunakan E-PPDB di SMP Negeri 4 Sawan dan SD yang menjadi zonasinya; teknik wawancara yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok masalah yang ditanyakan kepada informan; teknik pemanfaatan dokumen yaitu memanfaatkan semua dokumen yang berkaitan dengan penggunaan sistem E-PPDB di SMP Negeri 4 Sawan dan SD yang menjadi zonasinya.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam analisis data, peneliti menggunakan *interactive model*. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014), analisis data *interactive model* dilakukan melalui proses pengumpulan data (*data collection*) yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan; reduksi data (*data reduction*) adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang, perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang; penyajian data (*data display*) yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung; verifikasi data (*verification*) yaitu dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak diikuti dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Implementasi E-PPDB pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan**

Pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kinerja para pelaksana kebijakan, dan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut (Sudianing, 2019). Aktor implementasi E-PPDB tingkat SMP adalah panitia PPDB satuan pendidikan SMP dan SD. Peneliti menganalisis implementasi E-PPDB menggunakan teori Edward III yang menggunakan empat variabel sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (dalam Subarsono, 2011).

#### **4.1.1. Komunikasi**

Bagian dari komunikasi ada tiga yaitu penyaluran (transmisi), adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana agar dalam pelaksanaannya tidak membingungkan, dan adanya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2010). Komunikasi dalam implementasi E-PPDB diawali dari kegiatan Disdikpora Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan sosialisasi PPDB sekaligus penggunaan E-PPDB kepada satuan pendidikan SD dan SMP. Para pelaksana kebijakan E-PPDB sudah cukup mengetahui bagaimana alur dari penggunaan E-PPDB tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik.

Hal-hal yang dilakukan pelaksana kebijakan agar komunikasi dalam implementasi E-PPDB ini dapat berjalan dengan baik, yaitu pelaksanaan sosialisasi PPDB dengan sistem daring untuk seluruh kepala sekolah satuan pendidikan SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Disdikpora Kabupaten Buleleng, pelaksanaan sosialisasi E-PPDB dengan sistem luring untuk seluruh operator satuan pendidikan SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Disdikpora Kabupaten Buleleng, pelaksanaan sosialisasi oleh kepala satuan pendidikan kepada guru dan pegawai sekolah sebagai pelaksana kebijakan, pelaksanaan sosialisasi E-PPDB kepada peserta didik SD sebagai kelompok sasaran, yang akan melanjutkan ke SMP, dan pemanfaatan media *online* sebagai implementasi kebijakan E-PPDB yang diwujudkan dalam bentuk web <https://e-ppdb.bulelengkab.go.id/>, sebagai antarmuka pelaksana dan kelompok sasaran.



#### **4.1.2. Sumber Daya**

Sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah staf pelaksana, informasi, kewenangan dan fasilitas yang diperlukan dalam implementasi kebijakan (Yalia, 2014). Sumber daya merupakan salah satu hal terpenting dari implementasi kebijakan, oleh sebab itu “diperlukan kemampuan sumberdaya manusia yang berkualitas” (Sandiasa & Sudianing, 2021: 37). Karena sumber daya merupakan pelaksana dari sebuah kebijakan yang dibuat. Sumber daya yang digunakan pada implementasi E-PPDB adalah staf pelaksana yang diwujudkan dengan pembentukan panitia PPDB dan menugaskan operator yang khusus menggunakan sistem E-PPDB tersebut, informasi teknis mengenai sistem E-PPDB yang dilaksanakan dengan cara mengadakan sosialisasi dari Disdikpora Kabupaten Buleleng kepada satuan pendidikan SD dan SMP, dan segala sarana prasarana yang digunakan dalam implementasi E-PPDB berupa komputer dan jaringan internet. Implementasi E-PPDB dapat berjalan dengan baik, tentu saja karena antar pihak satuan pendidikan SD dan SMP terjalin suatu kerjasama yang baik, sehingga implementasi E-PPDB dapat terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan.

#### **4.1.3. Disposisi**

Disposisi adalah faktor yang memperlihatkan ketanggapan sikap dari pelaksana kebijakan. Beberapa operator E-PPDB di tingkat satuan pendidikan SD masih perlu meningkatkan komitmen dalam memasukkan data alamat siswa SD yang akan melanjutkan SMP. Karena sesuai Perbup 14 tahun 2021, isian data alamat siswa harus sesuai dengan alamat rumah siswa bersangkutan, diharapkan operator SD tidak memasukkan alamat sekolah pada semua siswanya. Karena hal tersebut membuat sulitnya perankingan yang dilakukan sistem. Namun, sebagian besar pelaksana kebijakan telah memiliki ketanggapan sikap yang baik dalam melaksanakan E-PPDB tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sikap pelaksana yaitu pelaksana kebijakan sudah memiliki kemandirian sikap dalam melaksanakan tugas yaitu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kecil dalam lingkup internal sekolah dulu, penyelesaian masalah yang dilakukan pelaksana kebijakan sudah dilakukan dengan baik, yaitu memanfaatkan media komunikasi untuk dapat segera menyelesaikan masalah, dan pelaksana kebijakan dapat dengan cepat menguasai alur pendaftaran atau cara pendaftaran di [\*Locus Majalah Ilmiah Fisip Vol 15 No. 1- Pebruari 2023 | 9\*](https://e-</a></p></div><div data-bbox=)

ppdb.bulelengkab.go.id/, karena memang sistemnya yang *user friendly* atau mudah dimengerti pengguna.

#### **4.1.4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi mengarah pada SOP (Standar Operasional Prosedur), sebagai tuntunan internal dari implementasi suatu kebijakan yang seragam dan fragmentasi yang merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional yang tersebar luas. Dilihat dari aspek struktur birokrasi dari pelaksanaan E-PPDB ini dapat disimpulkan bahwa adanya pembagian tugas yang jelas dari semua pihak yang terlibat dalam implementasi E-PPDB ini, adanya panduan pelaksanaan baik secara manajemen maupun panduan E-PPDB yang tercantum dalam Perbup, dan adanya kriteria yang jelas tentang siswa yang diterima.

### **4.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi E-PPDB pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan**

Pada proses meneliti faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi E-PPDB, peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan operator sekolah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan SD di desa Sangsit dan SMP Negeri 4 Sawan sebagai pengguna langsung sistem E-PPDB tersebut. Indikator yang digunakan untuk meneliti faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi E-PPDB adalah faktor teknologi, manajemen dan sumber dayanya.

#### **4.2.1. Faktor Pendukung Implementasi E-PPDB pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan**

Faktor internal yang menjadi pendukung dalam implementasi E-PPDB ini adalah kompetensi SDM pengelola layanan E-PPDB yang sudah mencukupi; kecepatan komputer yang digunakan operator E-PPDB yang baik sangat dibutuhkan dalam penggunaan sistem E-PPDB; kekuatan jaringan internet yang baik juga merupakan hal yang sangat penting, karena sistem E-PPDB ini hampir sebagian besar dilaksanakan secara daring atau *online*; kemampuan kepala sekolah dalam mengimplementasikan E-PPDB merupakan faktor pendukung yang tidak kalah penting bagi sekolah; kemampuan manajemen kepala sekolah dari membuat pemetaan zonasi, membentuk panitia PPDB, sampai pada proses PPDB tersebut,

menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi E-PPDB; dan tersedianya sumber daya yang mumpuni dalam implementasi E-PPDB. Sumber daya manusia yang kompeten dalam penggunaan teknologi adalah salah satu faktor pendukung implementasi E-PPDB. Ketersediaan segala sarana prasarana yang digunakan dalam proses implementasi E-PPDB menjadi faktor pendukung demi keberhasilan implementasi E-PPDB. Jika dilihat dari faktor eksternal yang menjadi pendukung dalam implementasi E-PPDB ini adalah kerjasama antara orang tua murid dengan pihak sekolah yang terjalin baik, sebagian besar SD sasaran telah mampu mengikuti layanan E-PPDB, dan sistem yang *user friendly* atau mudah dimengerti oleh pengguna menjadi faktor pendukung dalam implementasi E-PPDB.

#### **4.2.2. Faktor Penghambat Implementasi E-PPDB pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan**

Faktor internal yang menjadi penghambat implementasi sistem E-PPDB ini, yaitu kekuatan sinyal internet yang rendah di beberapa tempat dan pelaksanaan input data oleh operator yang dilakukan mendekati *deadline*. Faktor eksternal yang menjadi penghambat implementasi sistem E-PPDB ini, yaitu terkadang sistem E-PPDB mengalami *error* yang disebabkan oleh banyaknya akses pengguna yang memasuki sistem secara bersamaan, jadi dapat dikatakan sistem yang belum adaptif dalam merespon input data, terutama yang dilaksanakan secara bersamaan dan masih ada beberapa orang tua siswa yang ingin mengubah cara kerja sistem dan menginginkan anaknya untuk ditolak di SMP yang sesuai zonasi tempat tinggalnya.

#### **4.3. Dampak Penggunaan E-PPDB pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan**

Setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tentunya akan memberikan dampak, khususnya pada kelompok sasaran yang menjadi tujuan dari diterapkannya kebijakan tersebut. Dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi- konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan (Islamy, 2010).

##### **4.3.1. Dampak Positif**

Dampak yang diharapkan dari implementasi sebuah kebijakan adalah adanya dampak positif. Dampak positif yang dihasilkan adalah sistem pendaftaran siswa

menjadi lebih efektif dan efisien bagi kelompok sasaran; teknik pengajaran pada semua kelas merata, tidak ada kelas yang homogen; pengaruh peserta didik yang berkemampuan tinggi lebih kuat kepada peserta didik yang berkemampuan sedang hingga rendah; peserta didik yang memiliki kemampuan lebih, tidak selalu mencari sekolah ke kota; kemudahan dalam mengakses kegiatan sekolah, karena jarak rumah peserta didik yang cukup dekat dengan sekolah sehingga meminimalkan biaya transportasi dan kegiatan sekolah dapat berjalan efektif dan efisien, kemudahan dalam membina siswa bagi guru BK; para orang tua siswa menjadi lebih tenang karena anaknya bersekolah di dekat rumah dan tidak memikirkan tentang pengeluaran dalam biaya transportasi.

#### **4.3.2. Dampak Negatif**

Selain dampak positif, implementasi E-PPDB tersebut juga terdapat beberapa dampak negatif yang dihasilkan. Dampak negatif dari implementasi E-PPDB ini adalah jika sumber daya tidak terpenuhi, seperti kompetensi pelaksana yang kurang memahami teknologi dan kondisi jaringan internet yang tidak stabil, akan membuat pendaftaran menjadi lambat; beberapa guru berpendapat bahwa ada perbedaan yang terlalu mencolok pada kemampuan siswa; dan beberapa siswa agak arogan karena bersekolah di daerah sendiri.

### **5. Simpulan dan Saran**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru secara elektronik (E-PPDB) pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan, dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, namun masih ada beberapa kekurangan pada disposisi atau ketanggapan sikap dari pelaksana kebijakan. Tetapi secara umum dapat digambarkan bahwa implementasi E-PPDB sudah sesuai tujuan dan tepat sasaran, sehingga dapat dikatakan sudah berjalan lancar dan sesuai harapan.
2. Faktor pendukung dari implementasi E-PPDB ini adalah kompetensi SDM pengelola layanan E-PPDB yang sudah mencukupi, performa komputer yang

baik, kekuatan jaringan internet yang baik, kemampuan manajemen kepala sekolah dari membuat pemetaan zonasi, membentuk panitia PPDB, sampai pada proses PPDB tersebut, tersedianya sumber daya yang mumpuni dalam implementasi E-PPDB, kerjasama antara orang tua murid dengan pihak sekolah yang terjalin baik, sebagian besar SD sasaran telah mampu mengikuti layanan E-PPDB, dan sistem yang *user friendly* atau mudah dimengerti oleh pengguna. Selain faktor pendukung, beberapa faktor penghambat implementasi E-PPDB adalah kekuatan sinyal internet yang rendah di beberapa tempat, pelaksanaan *input* data oleh operator yang dilakukan mendekati *deadline*, terkadang sistem E-PPDB mengalami *error* yang disebabkan oleh banyaknya akses pengguna yang memasuki sistem secara bersamaan, dan masih ada beberapa orang tua siswa yang ingin mengubah cara kerja sistem dan menginginkan anaknya untuk ditolak di SMP yang sesuai zonasi tempat tinggalnya.

3. Dampak positif penggunaan E-PPDB pada SMP Negeri 4 Sawan adalah sistem pendaftaran siswa menjadi lebih efektif dan efisien bagi kelompok sasaran, teknik pengajaran pada semua kelas merata, tidak ada kelas yang homogen; pengaruh peserta didik yang berkemampuan tinggi lebih kuat kepada peserta didik yang berkemampuan sedang hingga rendah; peserta didik yang memiliki kemampuan lebih, tidak selalu mencari sekolah ke kota; kemudahan dalam mengakses kegiatan sekolah; kemudahan dalam membina siswa bagi guru BK; para orang tua siswa menjadi lebih tenang karena anaknya bersekolah di dekat rumah dan tidak memikirkan tentang pengeluaran dalam biaya transportasi. Namun ada beberapa dampak negatif yaitu jika sumber daya tidak terpenuhi, akan mengakibatkan lambatnya proses implementasi kebijakan, beberapa guru berpendapat ada perbedaan yang terlalu mencolok pada kemampuan siswa, dan beberapa siswa bersikap arogan karena bersekolah di daerah sendiri.

## 5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka disarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Penulis menyarankan agar penggunaan E-PPDB dapat diterapkan secara menyeluruh dan merata di semua tingkat satuan pendidikan, tidak hanya pada satuan pendidikan SMP tetapi juga pada satuan pendidikan SD.

2. Dari segi sistem, disarankan agar dapat dikembangkan peningkatan validasi pada data alamat peserta didik saat melakukan pendaftaran ke tingkat SMP. Jadi meminimalisir penggunaan alamat yang sama pada sebagian besar peserta didik, yang menyulitkan dalam hal seleksi perankingan jarak alamat tempat tinggal.
3. Dari segi sikap staf pelaksana, disarankan agar memiliki rasa komitmen dan disiplin yang lebih baik dalam proses memasukkan data peserta didik SD saat melakukan pendaftaran.
4. Penulis juga menyarankan agar ke depannya lebih dikembangkan lagi sistem E-PPDB tersebut agar tidak hanya pada proses pendaftaran, tetapi dapat juga digunakan sampai pada proses pendaftaran kembali peserta didik di tingkat SMP.

## Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Islamy, Irfan. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juliawati & Gede Sandiasa, 2019. "Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng", dalam *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 2 – Agustus 2019*. P.1
- Kemendikbud. 2018. *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Setjen.
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Sandiasa, Gede. 2016. *Kebijakan Publik*. Singaraja: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Unipas Singaraja.
- Sandiasa, Gede dan Ni Ketut Sudianing, 2021. "Pelaksanaan Administrasi Dan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Covid 19". Dalam *Jurnal Widya Publika*. Vol.9, No.1 Juni 2021, P.37
- Suaedi, Falih dan Bintoro Wardianto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi dan E-Governance)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudianing, Ni Ketut dkk. 2019. "Implementasi Kebijakan Rumah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kabupaten Buleleng (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)". *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 1*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.  
Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Buku Kita.

Yalia, Mulyono. 2014. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat". *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol 6, No. 1. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/291910-implementasi-kebijakan-pengembangan-dan-093808c5.pdf>. Diakses tanggal 28 Februari 2022.